

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pembangunan Politik

1. Pengertian Pembangunan Politik

Istilah ‘pembangunan’ dapat didefinisikan mengandung pengertian adanya suatu situasi yang berkembang, atau suatu perkembangan kepribadian seseorang, untuk memperlihatkan sedikit lebih banyak daripada sekedar proses yang berlangsung, meski sulit untuk membayangkan pola umum yang menjelaskan setiap proses perkembangan. Istilah pembangunan yang longgar ini menurut C.H Dodd, dikutip Eddy Kurniawan (1991: 104), yang lebih mempersamakan pembangunan dengan perubahan semata, barangkali terletak pada definisi pembangunan politik yang dipandang sebagai usaha pencarian kemampuan umum belajar, dan memperbaiki tingkah laku melalui proses ini. Lebih lanjut Dadd mengatakan ‘pembangunan di lain pihak dapat diartikan sebagai kemajuan kearah tujuan yang lebih luas, atau kemajuan ke arah yang ditentukan oleh agen, atau oleh diri sendiri.

Langkah-langkah pembangunan politik akan mempengaruhi pula perkembangan sistem-sistem politik yang beralaku di berbagai Negara, sementara Gabriel Almond, menggariskan penilainnya, bahwa ciri-ciri sistem politik yang maju ada pada masyarakat pada masyarakat modern, sedangkan ciri-ciri sistem politik tidak maju ada pada masyarakat tradisional.

Pengertian Almond tentang tradisi dan modernitas, atau menurut istilah yang lebih disukainya ‘rasional’ digambarkan berdasarkan peristilahan Parson

yang berakar dalam tengah-tengah analisis sosiologi. Akan tetapi sumbangan khas Almond dalam hubungan ini adalah penekanan yang diberikan olehnya, bahwa ditinjau dari segi kultur, semua sistem politik adalah campuran, perpaduan unsur-unsur modern dan unsur tradisional. Jadi menurut Gabriel Almond semua sistem politik yang maju di barat maupun yang terbelakang di Negara-negara bukan barat adalah sistem-sistem peralihan.

Pengertian pembangunan politik memiliki beberapa perumusan yang dikemukakan oleh W.Pucian Pye, dikutip oleh Juwono Sudarsono (1991: 93) menyebutkan beberapa pandangan para ahli mengenai definisi pembangunan politik, W.Pucian Pye menyebutkan sepuluh pengertian tentang pembangunan politik yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pembangunan politik sebagai prasyarat politik untuk pembangunan ekonomi.
2. Pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan masyarakat industri.
3. Pembangunan politik sebagai modernisasi politik.
4. Pembangunan politik sebagai operasi negara-negara bangsa.
5. Pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum.
6. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa.
7. Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi.
8. Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur.
9. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan.
10. Pembangunan politik sebagai satu segi proses perubahan sosial.

Lebih daripada itu bahwa pembangunan politik terkait juga dengan masalah partisipasi massa dan kerlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi ini, bisa bercorak demokratis atau totaliter. Namun, yang terpenting adalah semua orang yang menjadi warga Negara ikut aktif dalam proses politik.

Begitu juga Pye mengungkapkan dalam kaitannya antara pembangunan politik dengan sistem politik ada tiga dimensi yaitu: pertama, penambahan

persamaan antara individu dalam hubungannya dengan sistem politik; kedua, pertambahan kemampuan sistem politik dalam hubungannya dengan lingkungannya; ketiga, pertumbuhan perbedaan lembaga dan struktur di dalam sistem politik itu. Secara generalisasi ada perumusan tentang pembangunan politik di mana memiliki empat pengertian-pengertian yang sering diulang-ulang: rasionalisasi, integrasi nasional, demokratisasi, dan mobilisasi atau partisipasi.

Selanjutnya, proses-proses yang terus ini bergantung pada perkembangan struktural dan kultural. Perubahan dalam struktur politik, seperti eksekutif, birokrasi, partai-partai, kelompok-kelompok kepentingan dan media massa. Adapun perubahan kultural mencakup persebaran nilai-nilai, sikap dan keterampilan dalam masyarakat yang konsisten dengan peran-peran tersebut, khususnya kesiapan untuk menuruti hukum, kecenderungan partisipasi dan harapan kesejahteraan.

2. Tujuan Pembangunan Politik

Tujuan pembangunan politik menurut Myron Weiner, seperti dikutip Ramlan Surbakti (2010: 302) bahwa tujuan pembangunan politik adalah sebagai integrasi politik, pemerintahan yang efisien, bersih, berwibawa (di Indonesia pada masa orde baru, tujuan ini terdapat pada Garis-garis besar Haluan Negara-GBHN). Samuel P. Huntington menyebutkan lima tujuan pembangunan politik, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas, dan otonomi nasional.

Sejumlah ilmuawan memusatkan perhatian pada tujuan-tujuan pembangunan mencoba menjelaskan dengan pendekatan yang berbeda.

Pendekatan-pendekatan tersebut sebagai berikut:

1. Tujuan-tujuan pembangunan politik sebagai selaras satu sama lain dengan alasan bahwa hal-hal yang baik selalu sesuai satu sama lain dan tujuan yang satu mendukung pencapaian tujuan yang lain.
2. Tujuan-tujuan pembangunan sebagai bertentangan sama sama lain karena setiap tujuan mempunyai implikasi yang mengurungi pencapaian tujuan lain. Pertumbuhan ekonomi bertentangan dengan pemerataan dan stabilitas bertentangan dengan demokrasi.
3. Pendekatan rekonsiliasi yang melihat tujuan pembangunan yang satu dapat direkonsiliasi dengan tujuan lain yang berisi: pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas (Ramlan Surbakti, 2010: 303)

3. Pendekatan Pembangunan Politik

Ada beberapa pendekatan pembangunan politik diantaranya fungsi sistem, proses sosial, dan perbandingan sejarah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sistem. Mengutip pendapatnya Jowono Sudarsono (1991: 100) bahwa dalam analisis pembangunan politik terdapat hubungan yang erat antara sistem teori dan struktur-fungsional. Tidak bisa dipisahkan antara penggunaan pendekatan fungsional tanpa menggunakan sebagian dari konsep sistem politik. Di antara konsep-konsep yang penting ialah: struktur, legimitasi, input dan output, umpan balik (*feedback*), lingkungan, equilibrium.

Pusat perhatian pendekatan ini tidak memusatkan pada masalah perubahan yang mana adalah dapat menggunakan konsep 'sistem' dalam suatu konteks yang dinamis, dengan fokus jarak, kepemimpinan ataupun umpan balik. Akan tetapi dalam kenyataannya, sebagian besar usaha teori tentang pembangunan politik yang bermula pada pendekatan sistem tidak memanfaatkan unsur-unsur dinamis dalam pendekatan itu. Tekanan yang diberikan pada model-model sistem politik

yang berbeda-beda tidak pada jenis-jenis perubahan dari satu sistem ke sistem lain. Seperti yang dikemukakan oleh David Apter *The Politics of Modernization* perubahan dianggap sebagai akibat sesuatu yang luar biasa. Perubahan dianggap sebagai akibat dari ketegangan atau tekanan, yang mengakibatkan adanya gerakan atau tindakan ke arah pengurangan tegangan atau tekanan itu dan karenanya menjurus kembali pada keadaan semula. Perubahan adalah sesuatu yang bukan alamiah, stabilas atau henti dianggap wajar.

B. Tinjauan Tentang *Civil Society*

1. Pengertian *Civil Society*

Seperti diuraikan sebelumnya, salah satu pakar Indonesia Muhammad A.S Hikam (1996) mengartikan bahwa *civil society* adalah kenyataan dari kehidupan sosial yang terorganisasi yang bersifat sukarela, swadaya, swadasembada, dan terbebas dari tekanan Negara, yang terikat oleh hukum yang berlaku. Seperti yang dikatakan Ketut Suwondo (2005: 14) bahwa makna dari *civil society* mengandung konotasi adanya masyarakat yang berada (*civilized society*) yang lebih menganut aturan-aturan yang berkaitan dengan sistem hukum daripada kepada aturan yang bersifat otoriter yang menindas. Dengan demikian, pandangan ini menganggap *civil society* sebagai suatu gerakan rakyat untuk membebaskan dari hegemoni Negara.

Cukup kiranya dengan melihat perkembangan *civil society* yang semakin mengakar luas bukan hanya pada tingkat nasional saja, *civil society* kini pun dalam rangka demokratisasi seperti di Indonesia saat ini bukan tidak mungkin

civil society tumbuh di aras lokal khususnya di pedesaan. Kiranya sesuai dengan pemikiran Chandhoke dalam bukunya Ketut Suwondo (2005: 12) mengemukakan suatu definisi mengenai perkembangan *civil society* di aras lokal khususnya di pedesaan Jawa, bahwa *civil society* adalah suatu tempat di mana masyarakat masuk ke dalam hubungan Negara (*‘the site at which society enters into a relationship with the state’*). Di dalam hal ini ada empat persyaratanyang harus dipenuhi bagi keberadaan *civil society* yaitu: pertama, nilai dari *civil society* yang berupa partisipasi politik dan *state accountability*. Kedua, intitusi dari *civil society* yang berupa forum representatif dan aspirasi sosial. Ketiga, perlindungan dari *civil society* adalah berhubungan dengan hak-hak individual secara umum. Keempat, anggota *civil society* adalah semua individu yang dilindungi hukum.

Civil society sebagai pemberdayaan warga negara yang akan dapat mendorong demokratisasi apabila mampu meningkatkan efektivitas masyarakat politik untuk menguasai/mengontrol negara. *Civil Society* bukan bermaksud hanya mengembangkan loyalitas yang khusus yang tertuju pada kelompoknya, tetapi juga kepada negara sebatas hak-kewajibannya sebagai warga negara tanpa membiarkan begitu saja negara melakukan dominasi dan hegemoni. *Civil society* adalah otonom dalam berhadapan dengan negara.

2. Komponen *Civil Society*

Komponen *civil society* seperti yang dikemukakan Afan Gafar (1999:180-184): meliputi empat hal pertama, **otonomi**: *Civil society* adalah sebuah masyarakat yang terlepas sama sekali dari pengaruh negara, yang meliputi bidang ekonomi, politik, ataupun bidang sosial, segala bentuk kegiatannya sepenuhnya

bersumber dari masyarakat itu sendiri, tanpa ada campur tangan dari negara. Kedua, **akses masyarakat terhadap lembaga negara:** *civil society* adalah akses masyarakat terhadap lembaga negara dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, setiap warga negara baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, harus mempunyai akses terhadap *agencies of the state*, artinya, individu dapat melakukan partisipasi politik dengan berbagai bentuknya, lebih dari itu kalangan negara/pemerintah harus memberikan komitmennya untuk mendengar, menerima keluhan dan aspirasi warganya dan diteruskan dengan mengambil sejumlah langkah-langkah kongkret untuk keperluan itu.

Ketiga, **arena publik yang otonom** adalah suatu ruang tempat warga negara mengembangkan dirinya secara maksimal dalam segala aspek kehidupan dibidang ekonomi atau bidang lainnya. Arena publik ini pada prinsipnya terlepas dari campur tangan negara agar bisa memiliki akses terhadap mereka. Keempat, **arena publik yang terbuka** adalah yang menyangkut arena publik, yaitu arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tidak dijalankan dengan cara yang bersifat rahasia, eksekutif, dan setting yang bersifat kooperatif. Masyarakat dapat mengetahui apa saja yang terjadi disekitar lingkungan kehidupannya, bahkan ikut terlibat didalamnya.

3. Ruang Lingkup *Civil Society*

Masyarakat sipil mencakup berbagai organisasi, formal dan informal meliputi:

- a. Ekonomi: Asosiasi-asosiasi (perkumpulan) dan jaringan komersial yang produktif.

- b. Kultural: Lembaga dan perkumpulan-perkumpulan yang bersifat religius, etnis, komunal, dan lain-lain yang membela hak-hak kolektif, nilai-nilai, kepercayaan, keyakinan, dan simbol-simbol.
- c. Informasi dan pendidikan: organisasi-organisasi yang yang mencurahkan dirinya pada sisi produksi dan penyebaran.
- d. Kepentingan: Kelompok-kelompok yang berusaha memajukan atau mempertahankan kepentingan materi maupun fungsional dari para aggotanya (misal, serikat buruh, asosiasi veteran dan pensiunan, dan kelompok-kelompok profesi).
- e. Pembangunan: organisasi-organisasi yang menghimpun sumber daya dan bakat individu untuk memperbaiki infrastruktur, lembaga, dan kualitas hidup komunitasnya.
- f. Berorentasi Isu: gerakan-gerakan untuk perlindungan lingkungan, reformasi lahan, perlindungan konsumen, dan hak-hak perempuan, minoritas etnis, penduduk pribumi, kaum cacat, dan korban-korban diskriminasi dan penganiayaan lain.
- g. Kewarganegaraan: kelompok-kelompok yang berusaha (secara nonpartisan) memperbaiki sistem sistem politik dan menjadikan lebih demokratis (misalnya, bekerja untuk hak asasi manusia, pendidikan dan mobilitas pemilih, monitoring pemilu, dan pengungkapan praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan lainnya) (Larry Diamond, 2003: 279).

C. Tjauan Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Non-Governmental (NGO)

Dalam arti umum, pengertian organisasi non pemerintah mencakup semua organisasi masyarakat yang berada di luar dan jalur formal pemerintah, dan tidak dibentuk oleh atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah (ICCE, 2011: 192). LSM diartikan sebagai intitusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Selain itu, LSM dalam konteks *civil society* juga bertugas menyelenggarakan *empowering* (pemberdayaan) kepada

masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari seperti advokasi, pelatihan, dan sosialisasi program-program pembangunan masyarakat.

Tentunya LSM disini ialah proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga posisi tidak sepenuhnya bergantung pada negara. Bahkan sebaliknya, bisa melancarkan kritik dan masukan pada negara secara leluasa tanpa takut akan tekanan-tekanan yang dilancarkan (negara). Kemandirian masyarakat dalam masyarakat antara lain disimbolisasikan lewat eksistensi LSM merupakan salah satu prasyarat terwujudnya *civil society*. Tanpa kemandirian, baik dari sisi sosial-ekonomi dan sosial-politik.

2. Variasi LSM

Tipologi atau kategorisasi LSM di Indonesia dikemukakan oleh beberapa ahli. Philip Eldridge dalam Mansour Fakhri (2008:120) membaginya dalam pendekatan berdasarkan kegiatannya dan mendefinisikan gerakan LSM Indonesia menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah LSM dengan label “pembangunan”. Kategori ini berkaitan dengan organisasi yang memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat konvensional, yaitu irigasi, air minum, pusat kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya. Kategori kedua adalah LSM ‘mobilisasi’, yaitu organisasi yang memusatkan perhatiannya pada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin sekitar isu yang berkaitan dengan ekologi, hak asasi manusia, status perempuan, hak-hak hukum atas kepemilikan tanah, hak-hak pedagang kecil, tunawisma dan penghuni luar dikota-kota besar.

Selain itu LSM/NGO dalam konteks Indonesia seperti yang disebutkan Philip Eldridge mengajukan tiga model hubungan antara NGO dengan negara dilihat dari dimensi orientasi NGO dalam melakukan kegiatannya yaitu antara lain:

a. Model *High Level Partnership; Grassroots Development*.

NGO yang masuk dalam kategori ini pada prinsipnya sangat partisipatif, kegiatannya lebih diutamakan pada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ketimbang advokasi. Kelompok ini kurang memiliki minat pada hal-hal yang bersifat politis.

b. Model *High Level Politics :Grassroots Mobilization*

NGO ini mempunyai kecenderungan untuk aktif dalam kegiatan politik. Kegiatan-kegiatan mereka tidak jarang berhubungan dengan usaha untuk mendukung peningkatan kesadaran politik masyarakat. Mereka pada umumnya tidak begitu saja dapat bekerja sama dengan pemerintah sekalipun ada juga diantaranya telah mendapat proyek-proyek penelitian dari pemerintah.

c. Model *Empowerment at the Grassroots*

NGO ini cenderung memusatkan perhatiannya pada usaha untuk memberdayakan masyarakat, terutama pada tingkat *grassroots*. Mereka tidak begitu berminat untuk mengadakan kontak dengan pejabat pemerintah (Afan Gaffar, 2009: 212-213).

Ditinjau dari segi paradigmanya LSM di Indonesia menurut Mansour Fakih (2008: 125-131) dibedakan dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, berparadigma konformis, yang visinya berangkat dari asumsi bahwa masalah demokrasi dan kondisi sosial ekonomi rakyat sebagai faktor yang inheren dengan kebodohan, kemiskinan, kerbelakangan dan keterpencilan. Motivasi utama utamanya adalah menolong rakyat dan didasarkan pada niat baik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kedua, yang menggunakan paradigma reformis. Kalangan LSM melihat perlunya peningkatan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Didasarkan pada

ideologi Modernisasi dan Developmentalisme. Dengan melihat latar belakang bahwa kondisi sosial ekonomi dan demokrasi karena tak berfungsinya elemen-elemen sosial politik yang ada, yang mana masyarakat kurang memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik dan pembangunan.

Selanjutnya *ketiga* adalah transformatoris. Gerakan ini lebih terasa radikal, di mana iklim atau isu keterbukaan dimanfaatkan untuk mencoba membongkar berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik. Rakyat didorong untuk mengontrol perubahan sosial dan menciptakan bagi masyarakat menuju jalan demokratis dalam perubahan sosial, ekonomi dan politik.

3. Peran LSM Proses Pembangunan

LSM memainkan berbagai macam peranan dalam proses pembangunan sebuah negara. Noeleen Heyzer mengidentifikasi ada tiga jenis peranan yang dapat dimainkan oleh NGO, adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “*grassroots*” yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas melalui jaringan kerja sama baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
- c. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan (Afan Gaffar, 2006: 203).

Sementara itu Andra. L. Corrothers dan Estie W. Suryatna, dikutip oleh Afan Gafar (2006: 203) dengan sedikit menekankan pada dimensi politik. Peranan yang dimainkan oleh NGO dalam sebuah negara Negara terdapat empat peranan antara lain. 1) katalisasi perubahan sistem; 2) memonitor; 3) memfasilitasi

rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan; 4) mengimplementasi program pelayanan.

D. Tinjauan Tentang Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Dari sisi literal atau sisi etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk setempat, dan “*kratos*” atau “*kratos*” yang berarti pemerintahan. Jadi, secara bahasa (etimologis), demokrasi adalah pemerintahan rakyat banyak. Secara terminologis demokrasi dapat diartikan seperti dinyatakan oleh beberapa ahli mengenai demokrasi (Sahid Gatara, 2009: 251). Dalam penertian peristilahan (terminologis), Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16, mengatakan bahwa’ pemerintahan dari rakyat (*democracy is government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government the people*).

Dalam bukunya Moctar Mas’oed tatanan politik seperti itu dapat digambarkan dengan memakai dua dimensi teoritik, yaitu: (1) seberapa tinggi tingkat konstetasi, kompetisi atau oposisi yang memungkinkan dan, (2) seberapa banyak warganegara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam komptesi politik itu. Menurut Henry B.Mayo, demokrasi mencakup beberapa norma atau nilai, yaitu penyelesaian perselisihan secara damai dan melembaga; terjadi perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; pergantian pimpinan secara teratur; pembatasan pemakaian kekerasan (paksaan) secara

minimum; pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman serta jaminan penegakan keadilan.

2. Demokratisasi

Syarat perubahan kearah tatanan yang lebih demokratis dalam bukunya Muctar Mas'ood (1994:13) mengutip gagasan Dahl adalah adanya sikap 'saling menjamin' antara pemerintah dengan aktor non-pemerintah. Karena masing-masing menyadari bahwa konfrontasi habis-habisan hanya merugikan semuanya, maka masing-masing terpaksa harus menyesuaikan diri dan berbagai kekuasaan. Argumen ini menyiratkan sikap 'moderasi'. Artinya demokratisasi adalah upaya '*bargaining*' rasional dan berjangka panjang, bukan tindakan yang bernafsu dan sekali jadi. Dahl menekankan pula kunci suksesnya transisi demokrasi menuju keberhasilan transisi kearah demokrasi terletak pada gradualisme, moderasi dan kompromi.

Seperti yang dikutip Muctar Mas'ood (1994: 13) dari pendapat Rostow menyatakan bahwa demokrasi memerlukan prasyarat sosial, ekonomi dan kultural tertentu dan Rostow dengan tegas bahwa prasyarat pokok bagi demokratisasi adalah 'pembinaan Negara-bangsa' demi kesatuan nasional. Agar tidak menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat, harus ada kesepakatan mengenai komunitas politik yang harus didukung oleh semua warga Negara.

Lain halnya dengan Lucian Pye dikutip oleh Siti Zuhro (2011: 29) menelaah demokrasi di Negara-negara Asia pada umumnya yang cenderung skeptis yang mana pendapatnya didasarkan tentang kultur politik paternalistik

yang membatasi kritikan, menciptakan ketergantungan dan mengedepankan aspek *unity*. Ini jelas-jelas mengambat pembangunan demokrasi.

Kemajuan demokrasi akan lebih berarti bila budaya politik lokal dipertimbangkan secara serius dalam mengadopsi elemen kunci institusi demokrasi. Terlebih lagi didasarkan pada realitas bahwa kemajuan demokrasi di Asia juga memiliki akar budaya dan dukungan budaya politik yang mempengaruhinya dan yang berevolusi tiap waktu.

E. Tinjauan Tentang *Institute For Research And Empowerment* Yogyakarta

1. Sejarah Singkat

Institute For Research And Empowerment berdiri di Yogyakarta pada tanggal 02 Juni 1994. Pendirian lembaga ini berangkat dari sebuah respons terhadap hilangnya otonomi dan daya kritis masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk konstruksi sosial politik yang represif dan diskriminatif, yang berasal dari rezim global, negara, pasar, maupun konteks sosio-kultural yang berakar dalam masyarakat. Masyarakat sangat tidak berdaya (*powerless*) ketika berhadapan dengan struktur sosial politik dan kultur yang melingkupinya.

Era transisi demokrasi pasca tumbanganya Orde Baru membuka harapan baru bagi masyarakat Indonesia, sekaligus juga tantangan. Restriksi negara mulai mengendor, tetapi euforia di era transisi justru diikuti dengan merebaknya kekerasan horizontal dalam konteks sosio-kultural masyarakat. Orang bisa melihat merebaknya kekerasan horizontal di berbagai daerah atau munculnya “tirani mayoritas” yang berbasis pada agama, etnis, ras, dan sebagainya. Di tempat lain,

masyarakat lokal juga belum bisa lepas dari tekanan rezim internasional yang melewati media pasar dan konteks sosio-kultural.

Pada awal keberadaannya tahun 1994, IRE menjalankan aktivitas sebagai kelompok studi yang membicarakan masalah-masalah sosial-politik melalui diskusi rutin, termasuk mengkaji literatur-literatur sosial dan politik terbaru. Kompas dan Jawa Pos banyak membantu kegiatan diskusi rutin IRE. Mulai tahun 1997 hingga sekarang, kegiatan IRE tidak lagi hanya memainkan peran sebagai kelompok studi yang berkuat pada diskusi rutin, tetapi berkembang menjadi LSM yang berkiprah pada pengembangan demokrasi bagi masyarakat. (<http://www.ireyogya.org/id/about/pengalaman-2f5c0f.html>).

Ketidakberdayaan masyarakat lokal itulah yang sampai saat ini tetap menjadi “justifikasi sosial” bagi IRE untuk tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Melalui upaya-upaya pemberdayaan IRE tetap berkiprah untuk memberikan sumbangsih bagi terwujudnya kemandirian dan *democratic civility* masyarakat lokal (<http://www.ireyogya.org/id/about/profil-ire.html>).

2. Profil

Institute for Research and Empowerment (IRE) adalah sebuah lembaga independen, nonpartisan, dan nonprofit yang berbasis pada komunitas akademik di Yogyakarta. Fokus kegiatan IRE adalah memperluas dan memperdalam demokrasi melalui penguatan gagasan, sikap kritis serta tindakan taktis elemen masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat ekonomi, dan Negara (<http://www.ireyogya.org/id/about/profil-ire.html>)

3. Visi-Misi

IRE, dengan bekal perspektif kritis, mempunyai mandat pemberdayaan untuk mengembangkan sejumlah nilai yang inheren dalam demokrasi yaitu antara lain: kemajemukan, otonomi, kemandirian, kesetaraan, permasaan, *civility*, keterbukaan, anti kekerasan, anti dominasi, anti diskriminasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, IRE menyatakan ‘perang’ terhadap wacana dan praktik-praktik aktor-aktor yang anti terhadap nilai-nilai demokrasi itu. Sehingga dalam melakukan kegiatannya untuk suatu tujuan lebih terarah diperlukan visi dan misi. Adapun visi dan misi IRE adalah:

Visi

Menjadi organisasi yang berperan dalam mengembangkan pengetahuan untuk memperngaruhi kebijakan strategis menuju terwujudnya negara yang kuat dan masyarakat lokal yang mandiri.

Misi

Sesuai dengan mandat dan visinya, IRE mengemban sejumlah misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pengetahuan melalui penelitian, pengembangan kapasitas, dan publikasi.
2. Membangun persenyawaan (*engagement*) multi pihak untuk reformasi kebijakan.
3. Mendorong negara bertanggung jawab memenuhi hak-hak warga dan komunitas
4. Memperkuat emansipasi entitas lokal yang berorientasi kesejahteraan
(<http://www.ireyogya.org/id/about/visi-dan-misi.html>)

Dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi, IRE berpegang teguh pada prinsip: kebebasan, persaudaraan, kesetaraan, keterbukaan, kemitraan, toleransi, dan akuntabilitas.

4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran IRE adalah aktor-aktor strategis baik di wilayah administratif desa sampai pusat maupun komunitas masyarakat lainnya seperti masyarakat adat. Dalam wilayah dan komunitas tersebut terdapat empat elemen yang saling berinteraksi: Negara, masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi. Sesuai dengan nilai organisasi, aktor-aktor strategis yang dijadikan kelompok sasaran bersifat plural, berdasarkan parameter etnis, kelas, gender, agama, dan profesi. IRE menempatkan diri sebagai sumber pengetahuan yang menfalisasi dialog antarelelemen maupun antarlapisan itu sebagai upaya mendinamisasi emansipasi masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi untuk mempengaruhi kebijakan strategis Negara (Booklet: Profil Organisasi IRE, hal. 4-5).

5. Program Utama

Program utama yang dalam kegiatan LSM IRE Yogyakarta ada empat aktivitas antara lain:

- a. *Pertama*, penelitian aksi yang bersifat kritis dan partisipatif terhadap berbagai fenomena ketidakberdayaan masyarakat, terutama untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat. Hasil-hasil penelitian senantiasa dirumuskan sebagai modal untuk keperluan program aksi dan perubahan dalam masyarakat.
- b. *Kedua*, pendidikan dan pelatihan, yang merupakan wahana untuk menghimpun dan mendiseminasikan pemikiran kritis dan wacana-wacana alternatif di berbagai komunitas aktor yang berasal dari negara, masyarakat

politik, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi, yang acapkali tidak mampu difasilitasi oleh institusi yang telah ada.

- c. *Ketiga*, publikasi, yang merupakan sarana artikulasi dan sosialisasi ide-ide kritis yang ditimba dari berbagai pemikiran dan aktivitas kelembagaan.
- d. *Keempat*, advokasi, yaitu gerakan bersama (melalui pengorganisasian, analisis kebijakan, dialog, dan publik hearing) untuk melakukan perubahan kebijakan publik di ranah negara dan rekayasa budaya dalam arena masyarakat sipil (<http://www.ireyogya.org/id/about/pengalaman-2f5c0f.html>).

E. Tinjauan Tentang Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal hendak dibangun.

Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu dan bersamaan dengan itu pulalah kebudayaan politik baru (Aflian, 1992: 235). Gabriel. A Almond juga mengemukakan pendapatnya bahwa *sosialitization*/pendidikan politik menunjukan pada proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan merupakan sarana bagi generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan politik pada generasi berikutnya.

Pendidikan politik merupakan metode penyampaian pesan dari sosialisasi politik. Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap-sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Pendidikan politik diartikan suatu proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenai negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik. Pendidikan politik ini dimaksudkan dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengalaman nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Di antaranya dapat melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan.

2. Bentuk Pendidikan Politik

Penyelenggaraan pendidikan politik akan erat kaitannya dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan di masyarakat nantinya. Keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat tercapai jika tidak dibarengi dengan usaha yang nyata di lapangan. Oleh karena itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih dapat menentukan keberhasilan dari adanya penyelenggaraan pendidikan politik ini.

Bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kartaprawira (2004: 56) dapat diselenggarakan antara lain melalui: 1. bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum; 2. siaran radio dan televisi serta film (audio visual media); 3. lembaga atau asosiasi

dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

F. Tinjauan Tentang Karakteristik Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana dalam paradigma kritis merupakan suatu upaya untuk melihat secara dekat bagaimana makna pesan yang diorganisasikan, digunakan, dan dipahami. Dalam ranah politik, analisis wacana kritis merupakan suatu praktek pemakaian bahasa, terutama politik bahasa. Karena bahasa merupakan aspek sentral dari penggambaran suatu subjek, dan lewat bahasa ideologi terserap di dalamnya, maka aspek inilah yang dipelajari dalam analisis wacana kritis. Paradigma kritis memandang bahwa realitas kehidupan sosial bukanlah merupakan suatu hal yang netral. Realitas kehidupan sosial dipengaruhi oleh berbagai kekuatan seperti politik, ekonomi, dan sosial. Konsentrasi analisis pada paradigma kritis adalah menemukan kekuatan yang dominan tersebut dalam memarginalkan dan meminggirkan kelompok-kelompok yang lain yang tidak dominan.

Bahasa dalam wacana kritis dipandang sebagai representasi yang membentuk subjek, tema, maupun ideologi tertentu. Analisis wacana kritis memandang bahasa sebagai faktor yang penting, bahasa tersebut digunakan dalam melihat ketimpangan kekuasaan yang terjadi di masyarakat. Karakteristik penting dari wacana kritis sendiri dipaparkan oleh Van Dijk, Fairclough, dan Wodak (dalam Eriyanto, 2001: 8-13) merupakan tindakan, konteks, historis, kekuasaan,

dan ideologi. Kelima karakteristik wacana kritis tersebut dijelaskan seperti pemaparan di bawah ini:

a. Tindakan

Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan atau sebuah interaksi. Wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyangga, bereaksi, dan sebagainya. Wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

b. Konteks

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Bahasa dipahami dalam konteks secara keseluruhan.

c. Historis

Wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk dapat mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Pemahaman mengenai wacana teks hanya akan diperoleh jika terlebih dahulu memberikan konteks historis dimana konteks tersebut diciptakan.

d. Kekuasaan

Analisis wacana kritis mempertimbangkan elemen kekuasaan (*power*). Wacana muncul dalam bentuk teks tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah atau bersifat netral tetapi merupakan suatu bentukan dengan campur tangan kekuasaan. Analisis wacana kritis tidak membatasi diri pada detil teks maupun struktur saja tetapi juga menghubungkan dengan kekuatan kekuasaan sosial, politik, ekonomi, maupun budaya tertentu.

e. Ideologi

Konsep sentral yang juga sangat berperan dalam analisis wacana kritis adalah ideologi. Hal ini dikarenakan teks maupun bentuk lainnya tersebut adalah bentuk dari praktek ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Wacana dalam hal ini dipandang Van Dijk sebagai medium melalui kelompok yang dominan mempersuasi dan mengkomunikasikan kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang dimiliki (Eriyanto, 2001: 8-13).

Kelima karakteristik di atas merupakan suatu karakteristik umum dari wacana kritis. Karakteristik tersebut menggambarkan wacana sebagai praktik

sosial yang menyebabkan suatu hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya serta menampilkan efek ideologi yang ada.

G. Tinjauan Tentang Ideologi

Definsi ideologi menurut Raymond William dikutip Eriyanto (2001: 87) salah satunya adalah bahwa ideologi merupakan sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki kelompok atau kelas tertentu. Ideologi di sini terlihat sebagai sikap seseorang, tetapi ideologi di sini tidak dipahami sebagai suatu yang ada dalam diri individu sendiri, melainkan diterima dari masyarakat. Ideologi bukan sistem yang unik yang dibentuk oleh pengalaman seseorang, tetapi ditentukan oleh masyarakat di mana ia hidup, posisi sosial dia, pembagian kerja dan sebagainya.

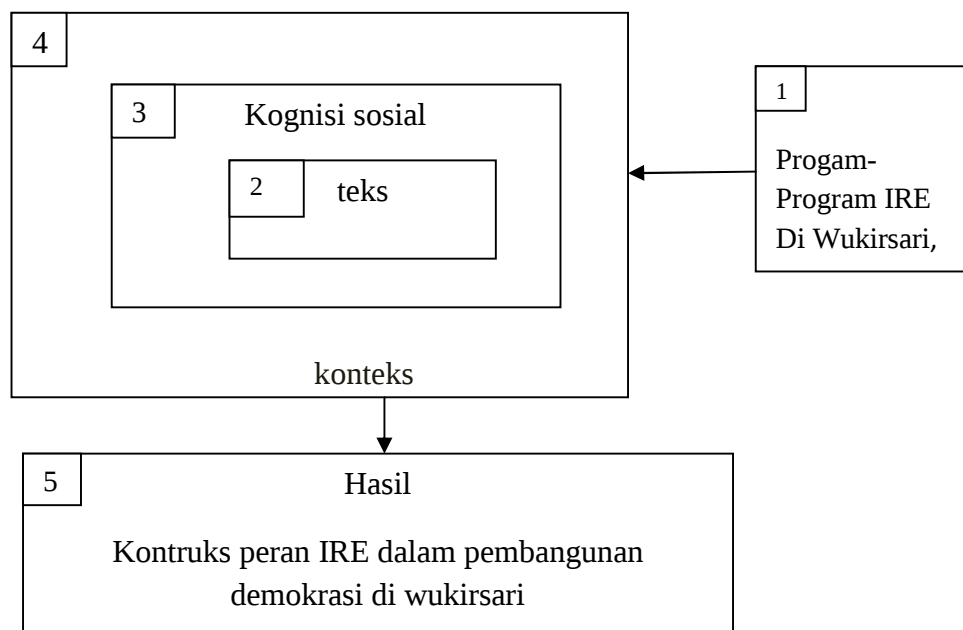
Van Dijk mengatakan bahwa ideologi dimaksudkan untuk mengatur masalah tindakan praktik individu atau suatu anggota kelompok. Ideologi membuat anggota dari suatu kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah mereka, dan member kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi di dalam kelompok. Ideologi dalam hal ini memberikan implikasi penting. Pertama, ideologi secara inheren bersifat sosial, tidak personal atau individual. Di mana ideologi membutuhkan share di antara anggota kelompok, organisasi atau kolektivitas dengan orang lainnya. Kedua, ideologi meskipun bersifat sosial, ideologi digunakan secara internal diantara anggota kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, ideologi tidak hanya menyediakan fungsi koordinatif dan kohesi tetapi juga membentuk identitas diri kelompok, membedakan dengan kelompok lain. Ideologi di sini bersifat umum,

abstrak, dan nilai-nilai yang terbagi antaranggota kelompok menyediakan dasar bagaimana masalah harus dilihat.

Ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Wacana dalam hal ini dipandang Van Dijk sebagai medium melalui kelompok yang dominan mempersuasi dan mengkomunikasikan kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang dimiliki (Eriyanto, 2001: 13).

H. Kerangka Berpikir

Kerangka kerja penelitian peran IRE Yogyakarta adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1: Skema kerangka berpikir peran IRE Yogyakarta berdasarkan analisis wacana kritis

Dari skema di atas dapat dijelaskan mengenai langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program-program IRE Yogyakarta di Wukirsari yaitu ditemukan, antara lain, program Pengembangan Wacana Demiliterisasi di Tingkat Lokal, program Pengembangan *Good Governance* Dalam Konteks Otonomi Desa, kegiatan Riset Advokasi Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola Industrialisasi Desa untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa, kegiatan "*Revitalising Craftwomen of Batik Cottage Industry in Bantul*".
2. Kedua, dari program-program tersebut dianalisis menurut analisis teks terhadap teks tertulis maupun teks yang berupa ujaran-ujaran peneliti IRE.
3. Ketiga, analisis kognisi sosial dengan melakukan wawancara untuk mengetahui seberapa jauh pandangan teks pembuat IRE dalam memandang sesuatu berkenaan dengan pembangunan demokrasi di Wukirsari.
4. Keempat, analisis konteks dengan melakukan berbagai penelusuran sejarah di mana terdapat di desa Wukirsari maupun studi pustaka.
5. Kelima, menarik simpulan berdasarkan analisis wacana teks.

